

LAPORAN



HASIL PELAKSANAAN SURVEY MANDIRI SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

**TRIWULAN III
TAHUN 2023**



PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**



DAFTAR ISI

BAB I KUESIONER SURVEI.....	2
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Pelaksanaan	6
1.3 Maksud dan Tujuan	6
BAB II METODOLOGI SURVEI	8
2.1 Kriteria Responden	8
2.2 Metode Pencacahan	8
2.3 Metode Pengolahan Data dan Analisis	9
BAB III PENGOLAHAN SURVEI	11
3.1 Analisis Hasil Survei.....	11
3.2 Nilai Tiap Unsur SPAK.....	15
3.3 Saran.....	16
3.4 Tindak Lanjut Hasil Survei	17
BAB IV KESIMPULAN	18



BAB I

KUESIONER SURVEI

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan penyelenggara layanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penilaian kualitas layanan. Hal ini diperlukan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. Penilaian kualitas layanan oleh masyarakat melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang dilakukan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan responden penerima pelayanan periode Juli s.d. September 2023. Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan secara rutin juga merupakan alat evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada Pencari Keadilan oleh pemerintah, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh Pencari Keadilan. Pelayanan publik harus diberikan kepada Pencari Keadilan karena adanya kepentingan publik (public interest), yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Untuk mengetahui kualitas



pelayanan pada unit layanan ini baik atau tidak maka penyedia layanan meminta data survey dari Pencari Keadilan.

Dalam lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, kuesioner survei yang diberikan ada 2 yaitu, Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

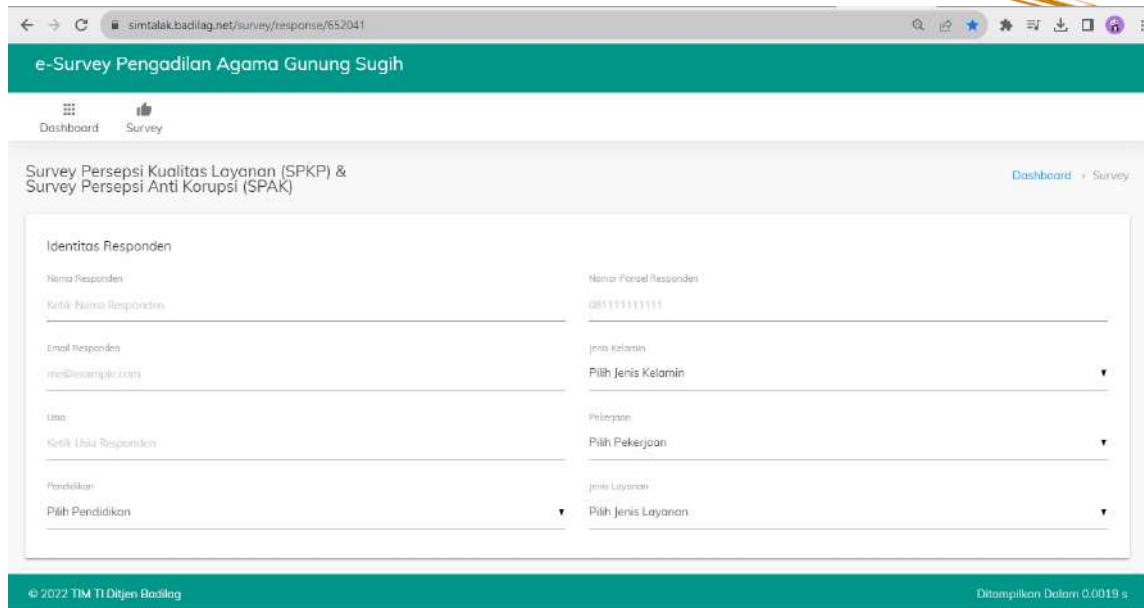
Untuk SPAK terdapat 5 pertanyaan yaitu :

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini
2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini;
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini;
4. Tidak ada pungutan liar(pungli) pada unit layanan ini;
5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini.

Pada setiap pertanyaan, terdapat bintang yang artinya semakin banyak bintang yang dipilih maka menunjukkan bahwa Bapak/Ibu pengisi survei semakin setuju bahwa kualitas pelayanan pada unit layanan ini (Pengadilan Agama Gunung Sugih) semakin baik.

Untuk pelaksanaan survey mandiri pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, melalui Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor : 1098/DjA.1/HM.00/4/2023 tanggal 04 April 2023 tentang Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi, pengisian survei mandiri melalui halaman website <https://simtalak.badilag.net/survey/652041>.

Berikut ini adalah tampilan dari laman yang akan diisi oleh pihak pengisi survei.

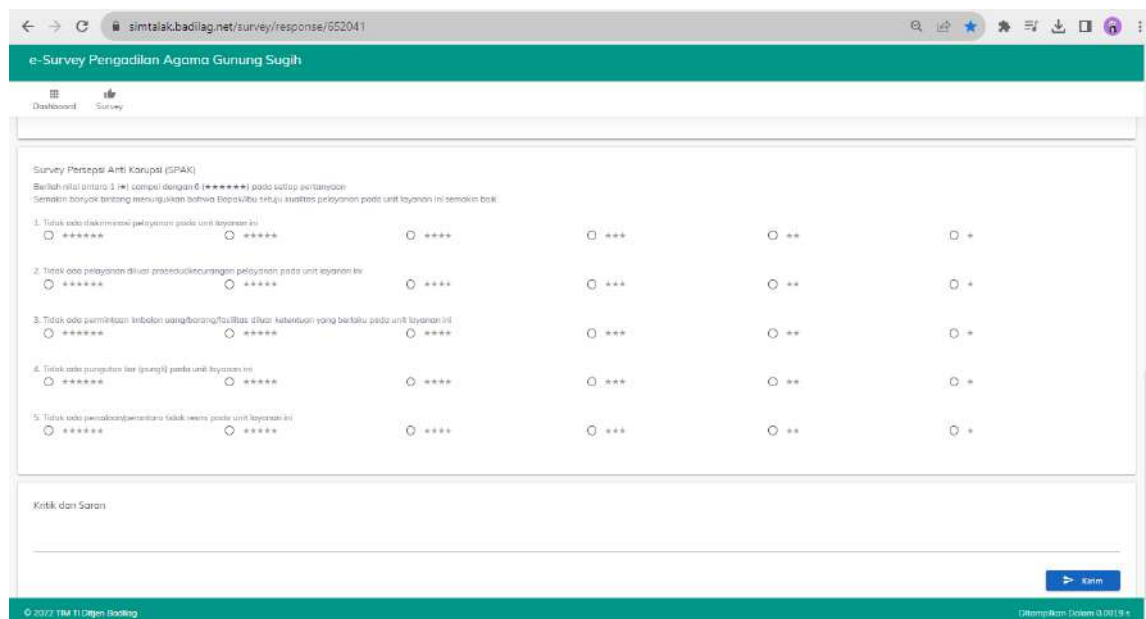


The screenshot shows the 'Identitas Responden' (Respondent Identity) section of the survey. It includes the following fields and options:

- Nama Responden:** Text input field.
- Ketik Nama Responden:** Text input field.
- Email Responden:** Text input field with placeholder 'me@exampl.com'.
- Ura:** Text input field.
- Ketik Ura Responden:** Text input field.
- Pendidikan:** Text input field.
- Pilih Pendidikan:** Dropdown menu.
- Nomor Ponsel Responden:** Text input field with placeholder '08111111111'.
- jenis Kelamin:** Dropdown menu with options 'Pilih Jenis Kelamin'.
- Pekerjaan:** Text input field.
- Pilih Pekerjaan:** Dropdown menu.
- jenis Layanan:** Text input field.
- Pilih Jenis Layanan:** Dropdown menu.

At the bottom, it shows '© 2022 TIM TI Ditjen Badilag' and 'Ditampilkan Dalam 0.0019 s'.

Gambar 1. Form Identitas Responden



The screenshot shows the 'Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)' section. It includes the following content:

Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
Berilah nilai antara 1 (S) sampai dengan 6 (S) pada setiap pernyataan. Semakin banyak bintang menunjukkan bahwa Anda setuju bahwa kualitas pelayanan pada unit layanan ini semakin baik.

- Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6
- Tidak ada pelayanan di luar prosedur/keputusan pelayanan pada unit layanan ini.
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6
- Tidak ada pemberian imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6
- Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini.
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6
- Tidak ada penyalahgunaan atau tidak sesuai pada unit layanan ini.
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Below the questions is a text area for 'Kritik dan Saran' and a 'Kirim' button.

At the bottom, it shows '© 2022 TIM TI Ditjen Badilag' and 'Ditampilkan Dalam 0.0019 s'.

Gambar 3. Form Survey Persepsi Anti Korupsi



1.2 Dasar Pelaksanaan

- a. Dasar Pelaksanaan Survei Dasar pelaksanaan Survei Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yaitu: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Daerah.
- e. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor : 1098/DjA.1/HM.00/4/2023 tanggal 04 April 2023 tentang Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Pembangunan Zona Integritas tertuju pada 2 (dua) sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan survei tersebut. Tujuan pelaksanaan survei adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil



pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih. Dengan pelaksanaan survei diperoleh manfaat:

- a. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- b. Mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih secara periodik; dan
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil sebagai upaya tindak lanjut hasil survei.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup objek survey kegiutan adalah seluruh proses pelayanan yang ada pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB.

Ruang lingkup responden adalah seluruh masyarakat ataupun stakeholder yang datang ke Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Ruang lingkup pelaporan hasil indeks Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), analisa hasil survey dan rencana tindak lanjut.



BAB II

METODOLOGI SURVEI

2.1 Kriteria Responden

2.1.1 Jumlah Responden

Jumlah responden Pengadilan Agama Gunung Sugih ditetapkan berdasarkan metode penetapan sampel “ Krejcuie dan Morgan”, dimana populasi/ jumlah perkara pada tahun 2022 sebanyak kurang lebih 3000 perkara maka harus memenuhi sampel sejumlah 341 responden. Responden adalah masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Ketentuan responden/penerima layanan on the spot (saat selesai menerima layanan) minimal berjumlah 30 (Tiga puluh) responden/ bulan atau 86 responden per triwulan.

2.1.2 Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan proporsional terhadap waktu banyaknya pengunjung.

2.2 Metode Pencacahan

Metodologi pencacahan dengan menggunakan formulir pada laman web, pengisi survei dapat mengisi dengan pilihan yang telah disediakan.

2.2.1 Atribut Pencacahan

Pihak yang telah mendapatkan pelayanan mengisi data sebagai berikut :

1. Nama Responden
2. Nomor Ponsel
3. Jenis Kelamin
4. Usia
5. Pekerjaan
6. Pendidikan



7. Jenis Layanan

Pihak memilih salah satu layanan dari :

- Layanan penyelesaian perkara;
- Layanan penyerahan produk pengadilan.
- layanan permohonan informasi dan layanan pengaduan.

2.3 Metode Pengolahan Data dan Analisis

2.3.1 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survei Kepuasan Pencari Keadilan terhadap 8 unsur pelayanan yang dikaji.

Untuk setiap pihak yang sudah mengisi, penilaian dilakukan dengan cara :

$$\text{Bobot Nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{5} = 0,2$$

Untuk memperoleh nilai SPKP unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPAK} = \frac{\text{Total dari nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversi dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Unit Palayanan} \times 25$$



2.3.3 Analisis

Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual maupun dengan menggunakan software Microsoft Excel. Pengolahan data akan menghasilkan output:

Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik



BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

3.1 Analisis Hasil Survei

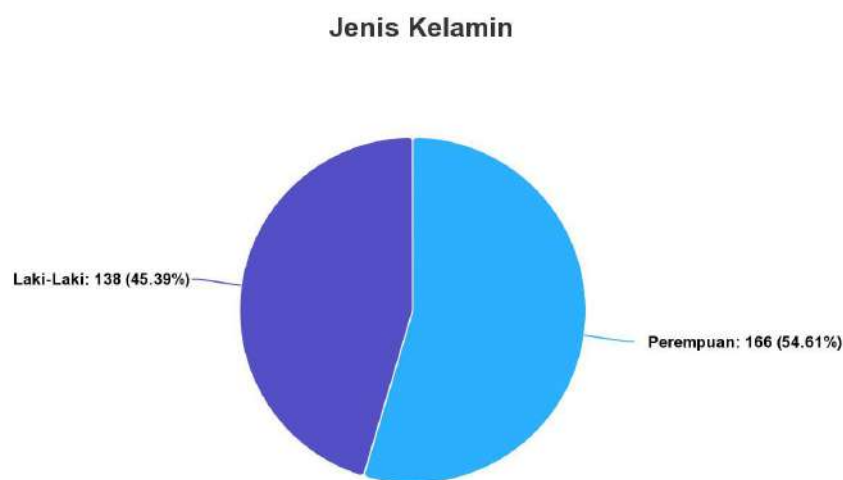
3.1.1 Jumlah Responden

Pada tampilan survei halaman web Dashboard Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Gunung Sugih memperoleh 304 responden, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	JENIS KELAMIN	Laki-Laki	138	49,39%
		Perempuan	166	54,61%
		TOTAL	304	100%
2.	PENDIDIKAN	Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan (Sederajat)	94	30,92%
		Sekolah Menengah Pertama (Sederajat)	72	23,68%
		Diploma IV/Strata I	52	17,11%
		Sekolah Dasar (Sederajat)	41	13,49%
		Tidak Sekolah	16	5,26%
		Strata II	16	5,26%
		Akademi/Diploma	10	3,29%
		Strata III	3	0,99%
		TOTAL	304	100%
3	PEKERJAAN	Mengurus rumah tangga	102	33,55%
		Petani/pekebun	45	14,80%
		Karyawan swasta	41	13,49%
		Pelajar/Mahasiswa	40	13,16%
		Pengacara	29	9,54%

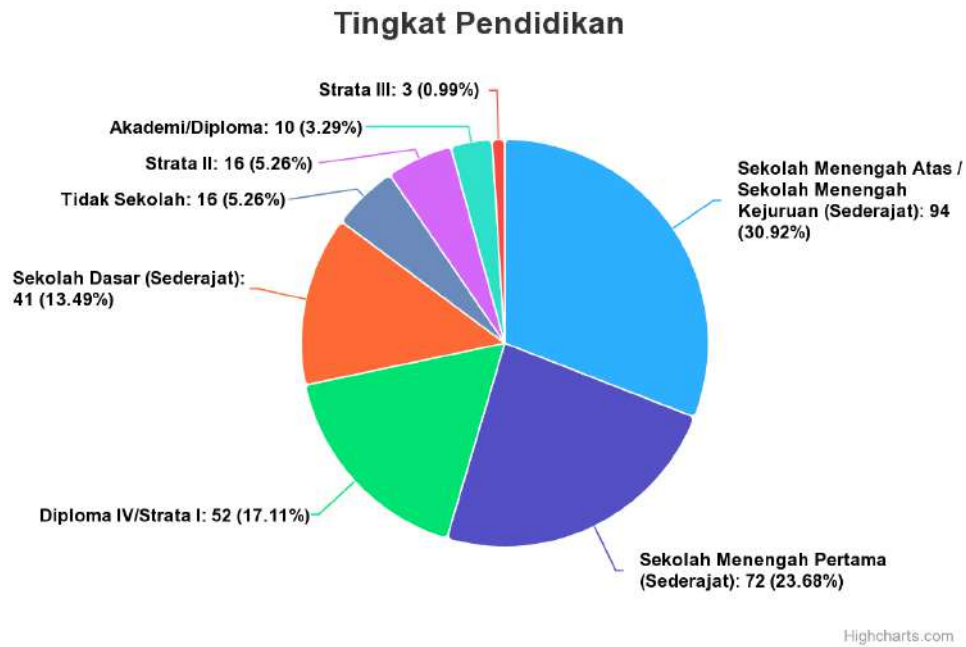
Perdagangan	14	4,61%
Belum/tidak bekerja	11	3,62%
Pegawai Negeri Sipil	6	1,97%
Peternak	3	0,99%
Karyawan Honorer	2	0,66%
Pensiun	2	0,66%
Kepolisian RI	2	0,66%
Buruh harian lepas	1	0,32%
Paranormal	1	0,32%
Guru	1	0,32%
Duta Besar	1	0,32%
Karyawan BUMN	1	0,32%
Tentara Nasional Indonesia	1	0,32%
Buruh peternakan	1	0,32%
TOTAL	304	100%

Berikut Grafik jumlah responden berdasarkan karakteristik jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan bersumber dari <https://simtalak.badilag.net/e-survey>.

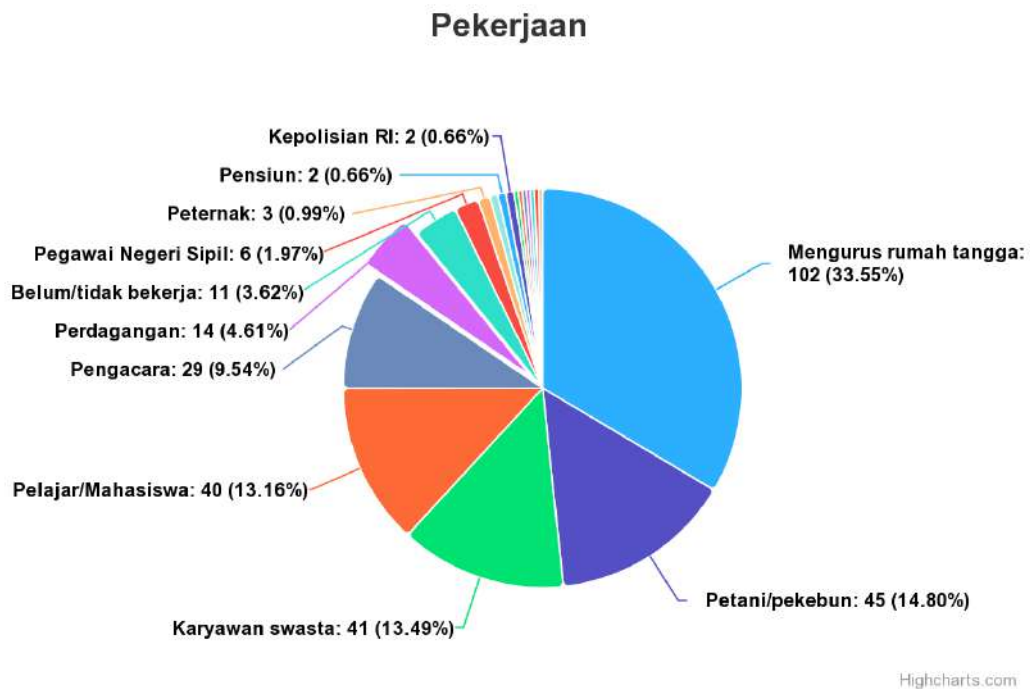


Highcharts.com

Grafik 1. Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Jumlah Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

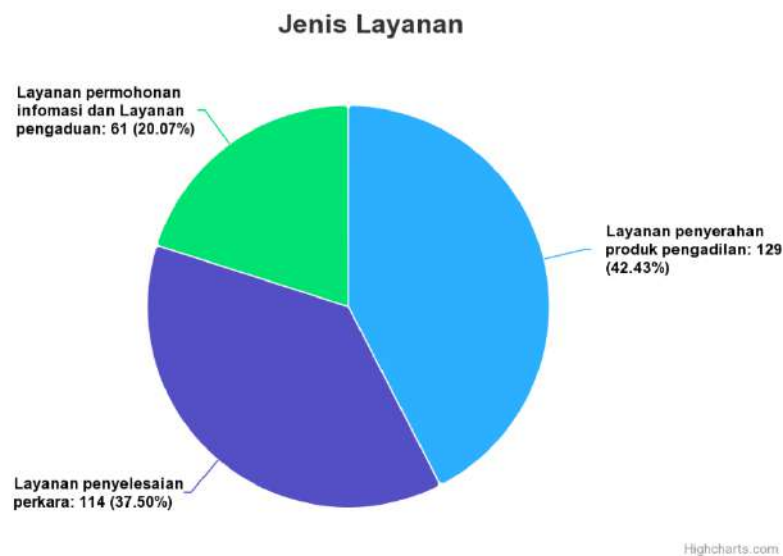


Grafik 3. Jumlah Responden berdasarkan Pekerjaan

3.1.2 Jenis Layanan

Pada tampilan survei halaman web Dashboard Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Gunung Sugih memperoleh jawaban survei jenis layanan sebagai berikut :

- Layanan penyelesaian perkara = 114 (37,50%)
- Layanan penyerahan produk pengadilan = 129 (42,43%)
- Layanan permohonan infomasi dan Layanan pengaduan = 61 (20,07%)

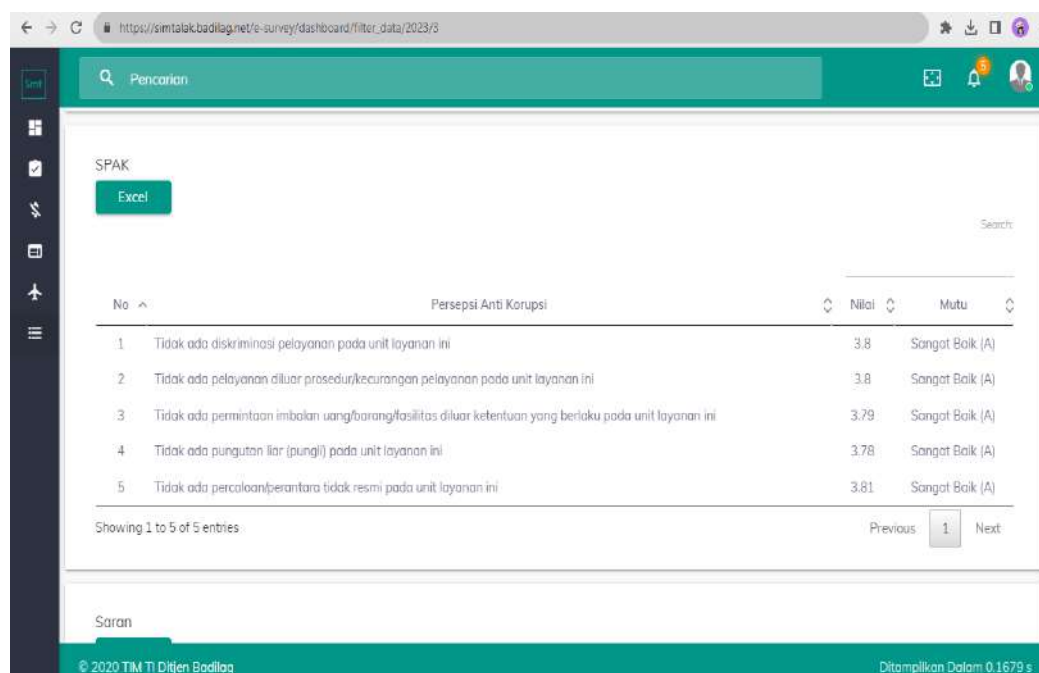


Grafik 4. Jenis Layanan yang digunakan.

3.2 Nilai Tiap Unsur SPAK

Pada tampilan survei halaman web Dashboard Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung Triwulan III Tahun 2023, Pengadilan Agama Gunung Sugih memperoleh hasil tiap unsur IPAK sebagai berikut :

NO	PERSEPSI ANTI KORUPSI	NILAI	MUTU
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	3,8	Sangat Baik (A)
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	3,8	Sangat Baik (A)
3	Tidak ada permintaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit	3,79	Sangat Baik (A)
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	3,78	Sangat Baik (A)
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini	3,81	Sangat Baik (A)



The screenshot shows a web dashboard for SPAK (Survei Persepsi Anti Korupsi) with a table of results. The table has columns for No, Persepsi Anti Korupsi, Nilai, and Mutu. The data is as follows:

No	Persepsi Anti Korupsi	Nilai	Mutu
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	3.8	Sangat Baik (A)
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	3.8	Sangat Baik (A)
3	Tidak ada permintaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	3.79	Sangat Baik (A)
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	3.78	Sangat Baik (A)
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini	3.81	Sangat Baik (A)

The dashboard also includes a search bar, a sidebar with navigation icons, and a footer with the copyright notice '© 2020 TIM TI Ditjen Badilag' and the display time 'Ditampilkan Dalam 0.1679 s'.

Gambar 5. Hasil Penilaian SPAK Triwulan III Tahun 2023



3.3 Saran

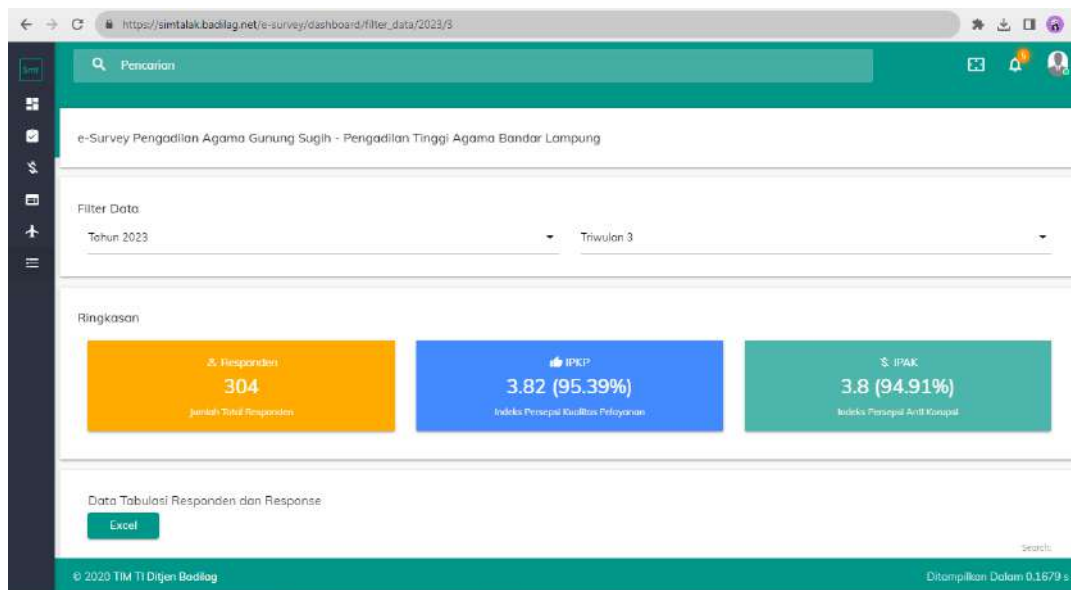
Pada tampilan survei halaman web Dashboard Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung Triwulan III Tahun 2023, Pengadilan Agama Gunung Sugih memperoleh hasil saran sebagai berikut :

NO	SARAN	NO	SARAN
1	Mohon dipertahankan layanan yg sudah baik ini	17	Lebih menjaga kebersihan aja si
2	Semua baik	18	Puas
3	Pengawai pada layanan produk hanya 1 orang sehingga petugas mondar mandir menghabiskan waktu tunggu , di mohon ada petugas tambahan agar layanan produk semakin cepat	19	Memuaskan
4	Sudah lebih baik	20	Mantap
5	Lebih baik lagi dalam pelayanan	21	Baik
6	Tingkatkan lagi menuju yg terbaik	22	Pelayanannya baik
7	Pertahankan dan atau tingkatkan pelayanan	23	Sangat baik
8	Kinerja sangat baik	24	Baik sekali
9	Bagus dab mantap	25	Sudah sangat baik
10	Pelayanan mantab, cepat tanggap, selalu maju	26	Pegawai kurang tertib
11	Semangat Prima	27	Sudah baik dan benar
12	Tingkatkan lagi	28	Sangat nyaman
13	Pelayanan yang sangat memuaskan	29	Nyaman
14	Pertahankan kualitas dan	30	Good job

	lebih di tingkatkan lagi		
15	Mantap	31	Mantap banget
16	Baik	32	Sukses

3.4 Tindak Lanjut Hasil Survei

Pengadilan Agama Gunung Sugih mendapatkan hasil survei Triwulan III Tahun 2023 sangat baik dari SPAK dengan nilai 3.98 (94,91%). Sehingga tindak lanjut hasil survei tersebut yakni dengan mempertimbangkan saran dari pihak penerima layanan.



Gambar 6. Hasil Penilaian IPKP dan IPAK dan Triwulan III Tahun 2023

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) selama kurun waktu hingga bulan September 2023 Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,8 (94,91%) dan masuk pada kategori “Sangat Baik A”.
2. Terdapat 1 unsur penilaian yang mendapatkan nilai yang rendah dibandingkan dengan nilai unsur lainnya yaitu “Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini” sebesar 3,78. Sehingga perlu adanya tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
3. Untuk saran dan masukan dari para responden yang sifatnya membangun, akan kami tindaklanjuti sehingga akan kedepan lebih maksimal dalam melaksabnakan pelayanan.

Gunung Sugih, 10 Oktober 2023

Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih,



AHMAD FERNANDESZ